

**RUMUSAN HASIL
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KEPALA BPSDM PROVINSI SE-INDONESIA DAN
KEPALA BKPSDM KAB/KOTA TAHUN 2019
(ACEH, 25 - 27 JULI 2019)**

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Juli 2019 di Provinsi Aceh, dengan tema **“Akselerasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BPSDM Kemendagri, Provinsi, Kabupaten/Kota Guna Mendukung Program Nasional Tahun 2020-2024”**, yang diikuti oleh Kepala BPSDM dan atau sebutan lainnya Provinsi seluruh Indonesia, dan Kepala BKPSDM dan atau sebutan lain Kabupaten/Kota. Rakornas BPSDM Kemendagri bertujuan untuk:

1. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Pusat, Daerah dan *Stakeholders Tahun 2020*.
2. Meningkatkan percepatan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Pusat, Daerah dan *Stakeholders Tahun 2020-2024*.
3. Membangun komitmen bersama dalam meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Berbasis Kompetensi.
4. Membangun gagasan program inovatif pengembangan SDM yang lebih efektif tepat sasaran guna menjawab visi misi presiden terpilih 2020-2024.
5. Menghasilkan rekomendasi strategis dan solutif antara pemerintah pusat, daerah dan *stakeholders*.

II. CAPAIAN BPSDM KEMENDAGRI

Capaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri selama Tahun 2015 – 2019, antara lain:

1. Telah terbentuk SKKPDN dan SP2PDN dalam Diklat Bela Negara dan SP2PDN Orientasi Anggota DPRD serta Perangkat Uji Kompetensi bagi Camat, Jabatan Pelaksana, dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Telah dilakukan sertifikasi untuk P2UPD, Camat dan Satpol PP sebanyak 8.567 Orang, Pimpemdagri sebanyak 90 Orang dan terbentuk LSP-PDN di 32 BPSDM Provinsi dan 2 Provinsi dalam proses pembentukan.
3. Pendidikan Politik dilakukan melalui Pembekalan Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintah daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) dengan alumni sebanyak 684 orang.
4. Pendidikan Politik juga dilakukan melalui orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD dengan alumni sebanyak 133.861 orang.
5. Pendidikan dan pelatihan struktural yang dilakukan melalui program peningkatan kompetensi pejabat pengawas di lingkungan kemendagri dengan alumni sebanyak 774 orang.

6. Pendidikan dan pelatihan struktural yang dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan alumni sebanyak 6.100 orang.
7. Pendidikan dan pelatihan struktural yang dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dengan alumni sebanyak 93 orang.
8. Pendidikan dan pelatihan fungsional yang dilakukan melalui program Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional P2UPD dengan alumni sebanyak 889 orang.
9. Pendidikan dan pelatihan teknis substantif kemendagri dengan alumni sebanyak 18.994 orang.
10. Pendidikan dan pelatihan bagi camat untuk peningkatan SDM bidang Pemerintahan (diklat yang diperuntukan bagi camat yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan) dengan alumni sebanyak 593 orang camat.
11. Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur Pemda penyelenggara urusan Pemerintahan Desa dari daerah tertinggal (Prioritas Nasional) sebanyak 1.265 orang.
12. Implementasi Revolusi Mental dan Bela Negara, yaitu:
 - Peresmian BPSDM Kemendagri sebagai Pusat Pengembangan Revolusi Mental;
 - Pendidikan dan pelatihan aparatur pelopor revolusi mental dengan jumlah alumni sebanyak 785 orang;
 - Pendidikan dan pelatihan bela negara dengan jumlah alumni 49 orang;
 - Pelaksanaan kader pelopor Revolusi Mental bagi Praja IPDN (bekerjasama dengan IPDN) dengan alumni sebanyak 1.458 Orang; dan
 - Pendidikan dan pelatihan Prajabatan/Latsar bagi alumni Praja IPDN dengan alumni sebanyak 13.979 Orang.

III. HASIL RAKORNAS

Setelah mendengarkan pengarahan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Aceh/ Kepala BPSDM Provinsi Aceh, presentasi Narasumber, dan diskusi dalam FGD (*Focus Group Discussion*), dilakukan pembahasan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Kelompok I topik "Sertifikasi bagi Pelaksana, Pengawas, Administrator, JPT, dan Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri";
2. Kelompok II topik "Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota";
3. Kelompok III topik "Pelatihan Dasar CPNS, Diklatpim dan Integrasi Diklat PIM dan Pimpemdagri";
4. Kelompok IV Topik "Diklat P2UPD, Satpol PP dan Damkar".

Sehubungan dengan pembahasan 4 (empat) kelompok dimaksud, maka disepakati dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri tentang Saran untuk peningkatan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan untuk JPT Pratama Administrator/Camat dan Pengawas/Lurah termasuk sertifikasi/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri (Pol PP, P2UPD, Damkar dan Capil) serta indeks biaya sertifikasi/uji kompetensi yang dibutuhkan dan surat program tahunan diterbitkan bulan Februari setiap tahun.

2. Alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN agar dimasukkan kedalam DAK, dengan pertimbangan pengembangan SDM masuk ke dalam program prioritas nasional 2020-2024.
3. Koordinasi antar Kementerian lembaga terkait penetapan formasi jabatan fungsional binaan kemendagri antara lain, pol pp, p2upd, damkar, dan capil sebelum pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi.
4. Perlu dilakukan rapat koordinasi pembinaan LSP-PDN setiap tahun.
5. BPSDM Kemendagri perlu berkoordinasi dengan BKN dan LAN RI terkait peninjauan kembali kebijakan masa percobaan CPNS satu tahun.
6. Strategi pelaksanaan Latsar CPNS untuk mengakomodasi kebutuhan Pemerintah Daerah yang telah memiliki anggaran tetapi sulit untuk mengirimkan maupun melaksanakan Latsar CPNS.
7. Perlu ditetapkan standar penguji pada Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan.
8. Perlu segera disusun peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan LAN-RI untuk mempercepat program pelatihan kepemimpinan terintegrasi.
9. Sertifikat kompetensi pelatihan kepemimpinan terintegrasi menjadi syarat untuk menduduki jabatan.
10. Perlu dibentuk tim penilai angka kredit untuk jabatan fungsional Pol-PP guna memfasilitasi penghitungan angka kredit Pol-PP yang telah diinpassing.
11. Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri agar setiap penyelenggaraan kegiatan Diklat dikoordinir oleh BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya dan BKPSDM atau sebutan lainnya (satu pintu).
12. Pada saat pembekalan bagi kepala daerah dan DPRD agar ditekankan alokasi anggaran peningkatan kapasitas sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2019.
13. Agar Surat Edaran ini disampaikan kepada Kepala Daerah sebelum Penetapan Anggaran Tahun 2020.
14. Membuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Penyelenggaraan Orientasi dengan pola fasilitasi.
15. Dimohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Kepala Daerah mengalokasikan anggaran Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 (terutama untuk Diklat PIM, Diklat Teknis dan Jabatan Fungsional P2UPD, Pol-PP, diklat teknis Dukcapil dll). Perihal alokasi pembiayaan sebesar 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan 0,16% bagi pemerintah kabupaten/kota yang diperuntukan bagi a. Pemenuhan Kompetensi Pemerintahan Pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki Jabatan Perangkat Daerah, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, III, dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagai mana amanat pasal 233 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Substantif Pemerintahan Dalam Negeri, c. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pemerintahan dikelola oleh OPD yang secara fungsional menangani pengembangan SDM yaitu BPSDM Provinsi atau sebutan lain dan BKPSDM

Kabupaten/Kota atau sebutan lain melalui kebijakan pengembangan SDM satu pintu. Kebijakan tersebut akan menjadi dasar untuk penyusunan alokasi anggaran pada Tahun 2020.

IV. PENUTUP

Perumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

WAKIL PEMERINTAH DAERAH

PERWAKILAN PEMBAHASAN 1



DONNY RIRIN VIANTO, SE.

PERWAKILAN PEMBAHASAN 2



H. ISKANDAR NASUTION, SH., M.Si.

PERWAKILAN PEMBAHASAN 3



CHATRINA D. NELLOH, S.Sos., M.Si.

PERWAKILAN PEMBAHASAN 4

JONDRI ALI, M.Si.

WAKIL PEMERINTAH PUSAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,

TEGUH SETYABUDI